

Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance

Bunga Rampai

Bunga Rampai

**Innovation and Technology
for Reformation in Public Sector Finance**

Buku Bunga Rampai "*Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance*" ini tersusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan menambah referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang keuangan sektor publik.

Rangkaian konsep dan isi yang disajikan dalam Buku Bunga Rampai ini bertujuan sebagai jendela pengetahuan bagi pembaca dalam memahami konsep-konsep secara sistematis tentang keuangan sektor publik. Isi dari Buku Bunga Rampai ini disusun berdasarkan kajian-kajian teoritis dan hasil penelitian yang menyangkut tentang keuangan sektor publik.

Diharapkan Buku Bunga Rampai yang merupakan kontribusi dari mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Jember dan Universitas Lambung Mangkurat ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang konstruktif dan dapat sebagai pembuka cakrawala dalam memahami keuangan sektor publik secara teoritis dan implementasinya

UPP STIM YKPN
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 7
Yogyakarta 55581
Telp.: (0274) 889317,
HP/WA: 08157988210
Email: uppstimykpn@gmail.com



PENYUNTING:
Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA

Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance

Bunga Rampai



PENYUNTING:
Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA

Bunga Rampai : Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance

Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Agustus 2023

PENYUNTING:

Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA

ISBN 978-623-7845-57-7



Penerbit dan Pencetak:

UPP STIM YKPN

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 7 Yogyakarta 55581

Telp./Faks. (0274) 889317, SMS Hotline 08157988210

Email: uppstimykp@gmail.com

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Ketua Tim Penulis dan Penyunting serta Ketua APSSAI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga Buku Bunga Rampai ini “*Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance*” terselesaikan. Buku Bunga Rampai ini tersusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan menambah referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang keuangan sektor publik.

Rangkaian konsep dan isi yang disajikan dalam Buku Bunga Rampai ini bertujuan sebagai jendela pengetahuan bagi pembaca dalam memahami konsep-konsep secara sistematis tentang keuangan sektor publik. Isi dari Buku Bunga Rampai ini disusun berdasarkan kajian-kajian teoritis dan hasil penelitian yang menyangkut tentang keuangan sektor publik.

Buku Bunga Rampai ini adalah hasil karya bersama serta didukung banyak pihak dari berbagai pihak. Untuk itu atas nama semua Penulis dan Penyunting serta sekaligus Ketua Asosiasi Program Studi S2 Akuntansi Seluruh Indonesia (APSSAI) saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Jember
2. Rektor Universitas Gadjah Mada
3. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses terselesaikannya Buku Bunga Rampai ini, baik dukungan dari keluarga, teman-teman Dosen sejawat dan mahasiswa yang ikut membantu pemikiran dalam penyempurnaan materi-materi buku serta berkenan memberikan gambaran pemikiran demi terselesaikannya Buku Bunga Rampai ini.

Diharapkan Buku Bunga Rampai ini yang merupakan kontribusi dari mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Jember dan Universitas Lambung Mangkurat dapat menjadi sumbangan pemikiran yang konstruktif dan dapat sebagai pembuka cakrawala dalam memahami keuangan sektor publik secara teoritis dan implementasinya. Saran dan kritik senantiasa diharapkan demi kesempurnaan isi dari Buku Bunga Rampai ini di kemudian hari. Semoga menjadi amal jariyah bagi kita semua. Aamiin.

Yogyakarta, Medio Agustus 2023

Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Akt. CA

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si, CRA.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, Bunga Rampai *Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance* dapat terselesaikan. Sistematika pembahasan Bunga Rampai *Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance* ini yaitu membahas beberapa studi kasus tentang keuangan sektor publik. Besar harapan penulis, kiranya bunga rampai ini yang merupakan salah satu output dari artikel mahasiswa magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan Universitas Lambung Mangkurat yang nantinya dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya terhadap Rektor Universitas Jember, Rektor Universitas Gadjah Mada, Rektor Universitas Lambung Mangkurat serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ/UGM/ULM dan Para Pimpinan serta civitas akademika. Penulis menyadari bunga rampai ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang konstruktif dari para pembaca.

Jember, Agustus 2023

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si, CRA

KATA PENGANTAR

Dr. Atma Hayat, Drs, Ec, M.Si, Ak, CA.

Assalamualaikum wr wb, Shalom, Om Swasti Astu, Namu Budhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati,

1. Rektor Universitas Jember
2. Wakil Rektor Universitas Jember
3. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
4. Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
6. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
7. Narasumber-narasumber

Serta yang saya banggakan para mahasiswa kami, terutama yang telah menyelesaikan artikel / tesisnya sehingga dapat di-diseminasikan pada kesempatan ini. Selalu kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di acara International Dissemination: Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance. Acara ini menjadi keberlanjutan dari kerjasama antara FEB ULM dengan FEB UNEJ. Tentunya kegiatan ini menjadi motor penggerak pencapaian indikator kinerja untuk unit fakultas masing-masing. Dengan mengusung tema besar "Sektor Publik", kami berkolaborasi dengan FEB UNEJ mencoba memberikan ruang eksplorasi bagi audiens untuk memperdalam peran inovasi IT di reformasi keuangan sektor publik.

Dalam era yang terus berkembang ini, inovasi dan teknologi telah menjadi pendorong utama dalam mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor publik dan keuangan. Transformasi ini muncul sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat akan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan dana publik. Dalam acara ini, kita akan menjelajahi bagaimana inovasi dan teknologi dapat memainkan peran yang vital dalam reformasi keuangan sektor publik. Salah satu poin penting dalam reformasi keuangan sektor publik adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi hadir sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini dengan cara yang lebih efektif. Solusi seperti sistem keuangan berbasis teknologi blockchain memungkinkan

catatan transaksi yang tak terubah dan dapat diakses oleh berbagai pihak secara real-time. Ini tidak hanya mengurangi risiko kecurangan, tetapi juga memberikan keyakinan kepada warga negara bahwa dana publik digunakan dengan benar.

Inovasi dan teknologi juga menghadirkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Automasi proses rutin seperti pembayaran, pengelolaan anggaran, dan pelaporan dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Selain itu, analitik lanjutan yang ditenagai oleh kecerdasan buatan dapat membantu para pengambil keputusan untuk merumuskan strategi yang lebih baik berdasarkan pola data yang teridentifikasi, menghasilkan alokasi anggaran yang lebih cerdas dan efektif.

Namun, pengimplementasian inovasi dan teknologi dalam sektor publik memerlukan pemberdayaan dan pendidikan yang baik. Sumber daya manusia perlu diberikan pelatihan dan pemahaman tentang teknologi yang akan diterapkan. Reformasi keuangan ini harus disertai dengan program-program pengembangan keterampilan agar para pegawai publik dapat menghadapi tantangan teknologi dengan percaya diri. Dengan pemberdayaan ini, sektor publik akan mampu mengambil manfaat maksimal dari potensi teknologi.

Sebagai penutup, kita melihat bahwa inovasi dan teknologi adalah pilar penting dalam reformasi keuangan sektor publik. Dengan transparansi yang ditingkatkan, efisiensi yang ditingkatkan, dan pemberdayaan yang kuat, kita dapat membayangkan masa depan yang lebih cemerlang untuk keuangan publik. Namun, kita harus mengingat bahwa teknologi hanyalah alat; semangat reformasi yang kuat dan komitmen untuk pelayanan publik yang lebih baik tetap menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr wb, Salam Sejahtera, Om Shanti Shanti Om.

Banjarmasin, Agustus 2023

Dr. Atma Hayat, Drs, Ec, M.Si, Ak, CA.

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM PENYUSUN	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Kata Pengantar	v
Bio Data Penulis	xi

ARTIKEL 1 PENDIDIKAN DAN FORMASI AUDITOR DALAM PELAKSANAAN REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Oleh : Mikaila

Khalisha Dadiarto, Ririn Irmadariyani	1
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
2. PEMBAHASAN	6
2.1 Pengaruh Pendidikan terhadap Pelaksanaan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7
2.2 Pengaruh Formasi Auditor terhadap Pelaksanaan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8
3. KESIMPULAN.....	9
1.1 Kesimpulan.....	9
4. DAFTAR PUSTAKA.....	10

ARTIKEL 2 AKUNTANSI MASJID: IDEOLOGI PANCASILA (STUDI MASJID DARUL FALAH JOMBANG JEMBER) Oleh : Femba Akris

Diantoro, Agung Budi Sulistiyo, Mohammad Fiqkri	11
1. PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang Masalah.....	11
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan.....	13
2. PEMBAHASAN	13

2.1 Profil Singkat Masjid Darul Falah	13
2.2 Struktur Organisasi Pengelolaan Masjid	14
2.3 Laporan Keuangan Masjid berdasarkan ISAK 35.....	14
2.4 Catatan atas Laporan Keuangan	16
2.5 Penerapan Ideologi Pancasila.....	16
3. KESIMPULAN.....	18
3.1 Kesimpulan.....	18
3.2 Saran.....	19
4. DAFTAR PUSTAKA.....	19

ARTIKEL 3 AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DI TEMPAT
IBADAH STUDI PADA AKUNTABILITAS PURA Oleh : Trisna Gayatri,
Yosefa Sayekti

21	
1. PENDAHULUAN	21
1.1 Latar Belakang Masalah.....	21
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan.....	23
2. PEMBAHASAN	23
2.1 Karakteristik Organisasi Keagamaan	23
2.2 Tujuan, Fungsi, dan Peran Organisasi Keagamaan.....	24
2.3 Pura	25
2.4 Struktur Organisasi di Pura	28
2.5 Sumber Pendanaan Pura	29
2.6 Pengelolaan Keuangan di Pura.....	30
2.7 Praktik Akuntabilitas Publik Pada Organisasi Keagamaan....	32
2.8 Praktik Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan di Pura .	33
2.9 Pelaporan Keuangan Organisasi Keagamaan.....	36
2.10 Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan Berdasarkan ISAK 35.....	38
2.11 Pelaporan Pengelolaan Keuangan di Pura.....	39
3. KESIMPULAN.....	42

3.1 Kesimpulan.....	42
3.2 Saran.....	44
4. DAFTAR PUSTAKA.....	45

ARTIKEL 4 PENERAPAN AKUNTANSI PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DI KABUPATEN LUMAJANG Oleh : Alifi Tria Susanti,

Ahmad Roziq	47
1. PENDAHULUAN	47
1.1 Latar Belakang Masalah.....	47
1.2 Rumusan Masalah	52
1.3 Tujuan.....	52
2. PEMBAHASAN	52
2.1 Deskripsi Subjek Penelitian pada LAZISMU Lumajang.....	52
2.2 Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Di LAZISMU Kabupaten Lumajang Dengan PSAK 109	53
3. KESIMPULAN.....	56
3.1 Kesimpulan.....	56
3.2 Saran.....	57
4. DAFTAR PUSTAKA.....	58

ARTIKEL 5 AUDIT INTERNAL SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA, EFEKTIFKAH? Oleh : Cici Wijayanti, Taufik Kurrohman, Arif

Hidayatullah	59
1. PENDAHULUAN	59
1.1 Latar Belakang	59
1.2 Rumusan Masalah	63
2. PEMBAHASAN	63
2.1 Audit Internal Sektor Publik Indonesia	63
2.2 Efektivitas Auditor Internal	66
2.3 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Auditor Internal	67

1.4 Independensi, Budaya Organisasi, Integritas, Kompetensi, dan Kerjasama Auditor Eksternal Meningkatkan Efektivitas Audit Internal Sektor Publik Indonesia	68
3. KESIMPULAN.....	70
3.1 Kesimpulan.....	70
4. DAFTAR PUSTAKA.....	71

ARTIKEL 6 AKUNTANSI AKRUAL UNIVERSITAS DI INDONESIA

Oleh : Ditio Adi Surya Wijaya Hadi, Siti Maria Wardayati, Isti Fadah,

Michael Chandra Gunawan

Michael Chandra Gunawan	75
1. PENDAHULUAN	75
1.1 Latar Belakang.....	75
1.2 Rumusan Masalah.....	81
2. PEMBAHASAN	82
2.1 Biaya Siswa	83
2.2 Dana Penelitian	84
2.3 Hibah Modal	85
2.4 Warisan Perpustakaan	86
2.5 Warisan Koleksi Artistik	87
2.6 Hasil Analisis	87
3. KESIMPULAN.....	89
1.1 Kesimpulan.....	89
4. DAFTAR PUSTAKA	90

ARTIKEL 7 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI FRAUD TENDENCY

ALARM SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB.LUMAJANG) Oleh :

Imanita Septian Rusdianti, Nining Ika Wahyuni, Alfi Arif

Imanita Septian Rusdianti, Nining Ika Wahyuni, Alfi Arif	93
1. PENDAHULUAN	93
1.1 Latar Belakang	93

2. PEMBAHASAN	95
2.1 Fraud Tendency	95
2.2 Pengendalian Internal	97
2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	97
2.4 Situs Penelitian: OPD Pemerintah Kabupaten Lumajang	98
2.5 Efektifitas Pengendalian internal dalam penerapan e finance sesuai komponen pengendalian internal COSO	98
2.6 Pengendalian Internal Sebagai Alarm Mencegah Fraud	101
3. KESIMPULAN.....	102
4. DAFTAR PUSTAKA.....	103

ARTIKEL 8 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

MASJID Oleh : Holilullah, Hendrawan Santosa Putra 105

1. PENDAHULUAN	105
1.1 Latar Belakang	105
1.2 Rumusan Masalah	108
2. PEMBAHASAN	108
2.1 Akuntansi	108
2.2 Akuntabilitas.....	108
2.3 Laporan Keuangan Non-Profit	109
2.4 Akuntabilitas Publik Pada Entitas Keagamaan	109
2.5 Praktik Akuntansi di Masjid Alamul Huda yang Masih Sederhana.....	110
1.6 Pengurus Sama-Sama Membantu terhadap Pengelolaan Keuangan Masjid Alamul Huda	111
1.7 Akuntabilitas Horizontal Para Pengelolaan Keuangan Masjid Alamul Huda Pada Seluruh Jamaah	113
1.8 Akuntabilitas Vertikal Sebagai Bentuk Tanggungjawab dalam Memakmurkan Masjid Alamul Huda	114
1.9 Profesi Pengurus Berbeda dengan Tanggungjawab	

Pekerjaannya.....	116
3. KESIMPULAN.....	117
4. DAFTAR PUSTAKA.....	118

ARTIKEL 9 DANA BOS: AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN TANTANGANNYA DI INDONESIA Oleh : Annisa Tri Hidayati, Atma

Hayat, Rahma Yuliani	121
1. PENDAHULUAN	121
1.1 Latar Belakang	121
2. PEMBAHASAN	123
2.1 Teori Keagenan.....	123
2.2 Good Governance	123
3. KESIMPULAN.....	130
3.1 Kesimpulan.....	130
4. DAFTAR PUSTAKA.....	131

ARTIKEL 10 PENTINGNYA MANAJEMEN KEUANGAN PADA PENGELOLAAN KEUANGAN YAYASAN PENDIDIKAN Oleh : Siti

Mutmainnah, Wahyudin Nor, Rahma Yuliani	133
1. PENDAHULUAN	133
1.1 Latar Belakang	133
1.2 Rumusan Masalah	135
2. PEMBAHASAN	136
2.1 Manajemen Keuangan Yayasan Pendidikan	136
2.2 Pentingnya Manajemen Keuangan Pada Yayasan Pendidikan	136
2.3 Siklus Manajemen Keuangan Yayasan Pendidikan	138
2.4 Sistem Keuangan pada Yayasan Pendidikan	139
2.5 Penyajian Laporan Keuangan Yayasan Pendidikan	140
2.6 Aspek perpajakan pada Yayasan Pendidikan	146
2.7 Tantangan Pengelolaan Keuangan Yayasan Pendidikan	147
3. KESIMPULAN.....	148

4. DAFTAR PUSTAKA.....	149
ARTIKEL 11 CONTINUOUS AUDITING DAN COUNTINUOUS MONITORING (CACM): TRANSFORMASI PENGAWASAN SEKTOR PUBLIK DI ERA DIGITAL Oleh : Dwi Puspita Sari,Wahyudin Nor.....	
1. PENDAHULUAN	151
1.1 Latar Belakang	151
2. PEMBAHASAN	152
2.1 Teori Keagenan	152
2.2 Transformasi Auditor Internal	153
2.3 Konsep <i>Continuous Auditing</i>	155
2.4 Konsep <i>Continuous Monitoring</i>	157
2.5 Penerapan <i>Continuous Auditing</i> dan <i>Continuous Monitoring</i> (CACM)	158
2.6 CACM dan <i>Three Lines Model</i>	160
2.7 CACM untuk Organisasi yang Efektif dan Efisien	162
3. KESIMPULAN.....	164
4. DAFTAR PUSTAKA.....	165

ARTIKEL 12 SIPD “MEREDUKSI” ATAU MEMPERKUAT Oleh :	
M. Khaidir Rahmatullah, Syaiful Hifni, Kadir	167
FUNGSI ANGGARAN DPRD?.....	167
1. PENDAHULUAN	167
1.1 Latar Belakang	167
2. PEMBAHASAN.....	170
2.1 Anggaran	170
2.2 Fungsi Anggaran DPRD.....	172
2.3 Peran DPRD Dalam Proses Penganggaran	173
2.4 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	174
2.5 SIPD Dalam Implementasi Fungsi Anggaran DPRD	176
3. KESIMPULAN.....	178

4. DAFTAR PUSTAKA.....	179
------------------------	-----

ARTIKEL 13 PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM (PTN BLU) DAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH) Oleh : Syamsu Rizal Noor, Atma Hayat, Ade Andriani		181
1. PENDAHULUAN		181
1.1. Latar Belakang		181
1.2. Rumusan Masalah		183
2. PEMBAHASAN		183
2.1 PTN dengan BLU		183
2.2 PTN-BH		185
3. KESIMPULAN.....		191
4. DAFTAR PUSTAKA.....		192

ARTIKEL 14 PERAN PERENCANAAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA Oleh : Indriaty Ermayani, Syaiful Hifni, Sarwani		195
1. PENDAHULUAN		195
1.1. Latar Belakang		195
2. PEMBAHASAN.....		200
2.1. Perencanaan Pada Akuntabilitas Sistem Keuangan Desa ...		200
2.2. Penggunaan Aplikasi Siskeudes dan Implikasinya		201
2.3. Pengendalian Internal pada Pengawasan Keuangan Desa ..		202
2.4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....		203
3 KESIMPULAN.....		204
4 DAFTAR PUSTAKA.....		205

ARTIKEL 15 INSPEKTORAT JENDERAL (AUDIT INTERN) DAN RISIKO AUDIT APAKAH PERAN INSPEKTORAT JENDERAL RENTAN TERHADAP RISIKO? Oleh : Yustisiana Sari, Kadir.....	209
1. PENDAHULUAN	209
1.1. Latar Belakang	209
2. PEMBAHASAN.....	212
2.1. Teori Kelembagaan.....	212
2.2. Teori Akuntabilitas	212
2.3. Audit dan Audit Internal.....	213
2.5. Regulasi terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Inspektorat Jenderal	214
2.6. Risiko	214
2.7 Risiko Audit	215
2.8 Manajemen Risiko	215
2.9 Kematangan Risiko (<i>Risk Maturity</i>).....	216
2.10 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	216
2.11 Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.....	216
2.12 Pengawasan Intern Berbasis Risiko	217
2.13 Inspektorat Jenderal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	217
2.14 Penelitian Terdahulu Terkait Audit Internal Berbasis Risiko ..	219
2.15 Audit Intern berbasis Risiko di Indonesia dan Permasalahannya	219
2.16 Faktor Penghambat Penugasan Audit Berbasis Risiko	220
2.17 Pembahasan faktor yang menghambat perencanaan Audit Intern Berbasis Risiko	220
2.18 Perubahan Paradigma dalam Pendekatan Risk Based Internal Auditing.....	221
3. KESIMPULAN.....	221
4. DAFTAR PUSTAKA.....	222

SUSUNAN TIM PENYUSUN	225
BIODATA SUSUNAN TIM PENYUSUN	227

ARTIKEL 11

CONTINUOUS AUDITING DAN COUNTINUOUS MONITORING (CACM): TRANSFORMASI PENGAWASAN SEKTOR PUBLIK DI ERA DIGITAL

Oleh :

Dwi Puspita Sari

Wahyudin Nor

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) selaku auditor internal sektor publik telah berubah. Tidak hanya sebagai *watchdog* yang melakukan pengawasan dari segi kepatuhan pada peraturan dan katalisator yang memberikan saran untuk dapat melakukan *best-practice*, tetapi juga menjadi *strategic partner* dan *trusted advisor* bagi manajemen pemerintahan untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam pencapaian tujuan.

Perkembangan globalisasi, kompleksitas regulasi, tekanan kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi pemerintahan yang cepat, menyebabkan semakin tingginya tanggungjawab manajemen dan munculnya beragam risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan. Manajemen pada organisasi sektor publik harus merespon dengan tepat, sehingga sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor*, APIP harus dapat memberikan nilai tambah dan informasi yang akurat dan cepat kepada manajemen, kapanpun informasi tersebut dibutuhkan.

Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat aliran informasi dan memperluas jangkauan penyebarannya, termasuk pada

organisasi sektor publik di Indonesia. Kita sudah mulai terbiasa dengan sistem berbasis teknologi informasi di lingkungan instansi pemerintah, seperti *e-budgeting*, *e-payment*, *e-procurement*, dan sebagainya. Biaya interaksi dapat ditekan melalui penggunaan teknologi seperti ini.

Pada tahun 2016, dalam Seminar Nasional AAIPI (Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia), terdapat pembahasan mengenai salah satu inovasi di bidang pengawasan yang disebut dengan CACM (*Continuous Auditing* dan *Countinuous Monitoring*). CACM adalah bentuk transformasi yang dapat dilakukan oleh APIP dan manajemen dengan memanfaatkan teknologi, yang bertujuan untuk memberikan solusi atas kelemahan dan celah dalam proses pengawasan tradisional. *Continuous Auditing* dilakukan oleh APIP dan *Countinuous Monitoring* dilakukan oleh manajemen pada organisasi sektor publik. Kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan, dan penerapannya akan sangat ideal jika dilakukan bersamaan.

CACM dapat menjadi alat untuk peningkatan kapabilitas, baik manajemen maupun APIP. Sampai dengan saat ini, budaya yang umum dipakai di Indonesia adalah *post monitoring* dan *post audit*. CACM adalah audit dan monitoring berkelanjutan, dimana pengawasan dilakukan secara terus menerus, terhadap semua tahapan manajemen sektor publik, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan. Konsep CACM masih tergolong baru di Indonesia, dan belum dikenal secara luas oleh organisasi-organisasi sektor publik. Dengan latar belakang inilah, permasalahan yang akan disajikan pada tulisan ini adalah bagaimana gambaran terkait konsep dan penerapan CACM, bagaimana keterkaitan CACM dengan *Three Lines Model* dan Apakah CACM dapat dipakai untuk memaksimalkan fungsi efektivitas dan efisiensi pada organisasi-organisasi sektor publik Indonesia.

2. PEMBAHASAN

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan mendefinisikan organisasi sebagai sekumpulan kontrak antara pemilik sumber daya atau disebut prinsipal, dengan pengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya, yang disebut agen. Terdapat dua permasalahan yang dapat terjadi akibat adanya hubungan

keagenan ini. Masalah yang pertama adalah terjadinya asimetris informasi, yang disebabkan pihak prinsipal mempunyai informasi lebih daripada agen. Masalah yang kedua adalah konflik kepentingan yang disebabkan oleh tujuan yang tidak selaras antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976).

Asimetris informasi dan ketidakselarasan tujuan adalah dua masalah yang diharapkan dapat diatasi dengan adanya audit dan monitoring berkelanjutan (CACM). CACM dapat memberikan transparansi data dari segala proses, kegiatan dan transaksi yang dilakukan. Semua pihak yang berkepentingan juga dapat memastikan semua proses tersebut tetap sejalan dengan tujuan organisasi.

Audit dan monitoring berkelanjutan ini tentunya harus didukung dengan tata kelola teknologi informasi yang baik, sehingga dapat menjamin tersedianya data yang berkualitas, andal, akurat dan cepat. Semakin andal data yang dihasilkan, segala keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut akan semakin tepat.

2.2 Transformasi Auditor Internal

Auditor internal berasal dari organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian independen sebagai suatu bentuk jasa bagi perusahaan. Penilaian yang dilakukan terkait dengan ketelitian, keandalan, efisiensi, dan keakuratan catatan-catatan, aktivitas dan pengendalian organisasi. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya, dalam hal ini dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang di audit (Lusiana dkk, 2016).

Untuk melakukan tanggungjawabnya, auditor internal melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menelaah memadai atau tidaknya penerapan sistem pengendalian operasional serta mengembangkan pengendalian alternatif yang lebih efektif.
2. Memastikan kebijakan yang ada telah diataati, begitu juga dengan rencana, prosedur dan standar operasional organisasi.
3. Memastikan pertanggungjawaban penggunaan aset perusahaan, untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan dan kecurangan.
4. Mengelola data yang dikumpulkan dan dimiliki organisasi.

5. Menilai pekerjaan dalam organisasi berdasarkan standar mutu dan *best practice*.
6. Menyarankan rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan internal auditor berfokus pada pencegahan kecurangan, pendeteksian dan penginvestigasian kecurangan. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa lembaga auditor internal, seperti:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dibentuk dengan Keputusan Presiden untuk bertanggung jawab kepada Presiden dalam hal audit internal pemerintah pusat.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagai auditor internal yang bertugas pada lembaga masing-masing.
3. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, merupakan auditor internal di lingkungan pemerintahan daerah.
4. Satuan Pemeriksa Intern pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Auditor internal dari masa ke masa, terus melakukan transformasi. Transformasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu '*transform*' yang artinya perubahan menjadi lebih baik. Perubahan ini dapat terjadi secara berangsur-ansur hingga tahap tertentu yang diharapkan, sebagai akibat dari adanya respon terhadap pengaruh internal dan eksternal.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, dalam rentang waktu tahun 1983 – 2000, kegiatan audit adalah penugasan utama auditor internal. Pelaksanaan peran *watchdog* dilakukan dengan objektif dan efektif, berfokus pada kepatuhan.

Fungsi *watchdog* mengalami pergeseran dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dalam rentang waktu 2001 – 2013, APIP berperan sebagai katalisator dan konsultan, untuk melakukan pendekatan pencegahan serta pembinaan.

Pada tahun 2014 sampai tahun 2022, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014

Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, APIP bertransformasi menjadi *trusted advisor*. Kepercayaan dan ekspektasi yang tinggi dari stakeholder menuntut APIP untuk menghasilkan pengawasan yang relevan, tepat kualitas dan cepat, sehingga hasil pengawasan dapat diandalkan oleh pengambil keputusan. Efektivitas peran audit internal ini memerlukan adanya sinergi dengan unsur manajemen.

Tingkat kematangan organisasi dan unit audit internal yang dikemukakan oleh Pitt (2014) level tertinggi dicapai apabila aktivitas audit telah terstruktur, sistematis, dapat memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan dan berfokus pada prioritas strategis (*embedded*). Selain itu, aktivitas audit harusnya menjadi pelayanan unggulan dalam organisasi. Dengan adanya pemanfaatan teknologi mutakhir, data dilakukan secara kolektif dan semua sumber daya manusia telah ahli dan berpengalaman mengoperasikannya. Fase ini hanya bisa dicapai apabila terjadi interaksi yang intensif antara manusia dan mesin.

2.3 Konsep *Continuous Auditing*

Continuous Auditing menurut (Rezaee et al., 2018) adalah sebuah proses pengauditan secara komprehensif menggunakan media elektronik untuk mengolah data secara berkelanjutan dan simultan, agar dapat menghasilkan tingkat penjaminan dan pengungkapan informasi yang berkualitas.

Global Technology Audit Guide (Coderre, 2005) mendefinisikan *continuous audit* sebagai sebuah metode untuk mengidentifikasi dan menganalisis keseluruhan proses aktivitas bisnis yang disajikan melalui data-data dengan menggunakan teknologi. Cakupan objek *continuous audit* lebih luas dibandingkan audit tradisional, sehingga dapat memungkinkan identifikasi temuan yang lebih teliti. Namun, perlu digarisbawahi bahwa *continuous audit* tidak untuk menghapuskan audit tradisional, melainkan kolaborasi untuk memfasilitasi kebutuhan data. Perbedaan *continuous audit* dan audit tradisional dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Perbedaan Audit Tradisional dan Continuous Auditing

Audit Tradisional	Continuous Auditing
Retrospektif (<i>cyclical</i>)	Berkelanjutan (<i>continuous</i>)
Fokus audit pada semua transaksi dan tumpukan bekas	Fokus audit pada transaksi irregular dan judgement profesional
Evaluasi perperiode	Asesmen terus menerus
Pengujian membutuhkan waktu yang lebih lama	Pengujian menjadi lebih cepat
Sampel transaksi terbatas	Pengambilan data populasi dapat dimaksimalkan dengan bantuan data aplikasi

Sumber: *Global Technology Audit Guide (2005)*

Manfaat *continuous audit* diantaranya adalah meningkatkan kemampuan untuk melakukan mitigasi risiko, mengurangi biaya dalam melakukan pengendalian internal, meningkatkan kemampuan keuangan, menyempurnakan operasi keuangan dan mengurangi kesalahan dalam aktivitas keuangan dan potensi adanya kecurangan (*fraud*). *Continuous audit* dapat memberikan peringatan dini akan aktivitas tidak biasa, sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk menghindari risiko lebih besar yang dapat terjadi.

Langkah-langkah implementasi *continuous audit* menurut *Global Technology Audit Guide (Coderre, 2005)* adalah:

1. Penetapan strategi audit

Penetapan strategi audit memerlukan adanya koordinasi dengan manajemen selaku pemilik risiko dan pengawas risiko. Koordinasi ini bertujuan untuk menetapkan prioritas dan memperoleh dukungan manajemen. Hasil dari koordinasi ini sebagai dasar untuk menyesuaikan rencana audit dan spesifikasi indikator *continuous audit* yang dilakukan.

2. Perolehan data rutin

Perolehan data rutin memerlukan izin akses dari manajemen. Data ini akan digunakan untuk menganalisa kapabilitas manajemen dan menentukan teknik audit berkelanjutan. Auditor harus melakukan validasi atas keandalan data.

3. Penentuan indikator-indikator audit

Penentuan indikator-indikator *continuous audit* dilakukan dengan asesmen dan pengendalian risiko. Pada tahap ini, ditentukan pengendalian kunci dan risiko yang dapat terjadi dalam pencapaian tujuan.

4. Pelaporan hasil audit dan rekomendasi.

Tahap pelaporan pada *continuous audit* dibangun dari metodologi berulang (revisi, analisis, merekomendasikan, catat dan pantau tindak lanjutnya). Hasil audit berkelanjutan dijadikan dasar untuk memfasilitasi keputusan manajemen berkelanjutan, dan kemudian dilakukan monitoring berkelanjutan dengan penyesuaian strategi audit apabila terjadi perubahan kondisi pada manajemen.

2.4 Konsep *Continuous Monitoring*

Continuous monitoring didefinisikan sebagai sebuah mekanisme umpan balik oleh manajemen untuk memastikan berjalannya sistem operasi dan transaksi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Sarwar et al., 2010). Manfaat *continuous monitoring* adalah meningkatkan kemampuan manajemen untuk mengidentifikasi dan mengendalikan masalah, mengurangi kemungkinan kesalahan dan kecurangan, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi overpayment, dan meningkatkan kepuasan *stakeholders* terkait pelayanan berkualitas dan dan berintegritas.

Menurut Lusiana dkk (2016), kesuksesan manajemen organisasi sektor publik tidak lepas dengan tiga peran utamanya di dalam masyarakat, yaitu sebagai:

1. Pihak yang menetapkan segala regulasi. Tanpa regulasi yang baik dan efektif, akan terjadi kekacauan dan ketimpangan dalam masyarakat.
2. Penjamin atas kelancaran aktivitas penerapan regulasi yang dibuat.
3. Pengendali dan pengawas atas segala aktivitas publik.

Dilihat dari ketiga peran ini, pelaksanaan monitoring kondisi masyarakat berkelanjutan adalah sebuah urgensi untuk tercapainya cita-cita pemerintahan yang baik (*good governance*).

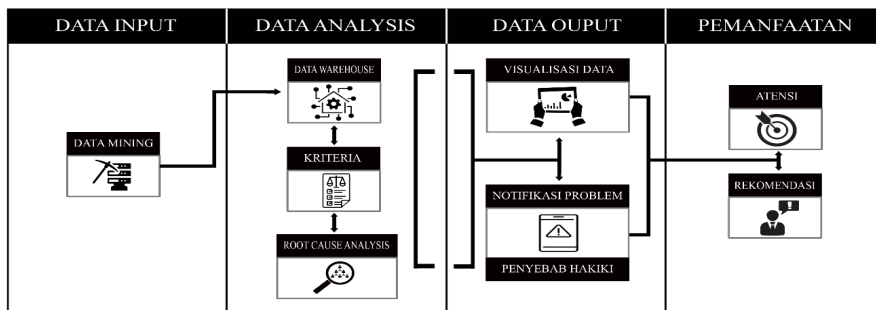
2.5 Penerapan *Continuous Auditing* dan *Continuous Monitoring* (CACM)

Tantangan penerapan CACM adalah adaptasi. Manajemen dan APIP harus memiliki kemampuan untuk membaca, mengumpulkan, dan menganalisa data yang dihasilkan oleh aplikasi. Integrasi aplikasi juga bukanlah hal yang mudah, terutama ditengah keterbatasan sarana prasarana pendukung. Selain itu, pembuatan data yang terstruktur untuk dapat dikompilasi dan diintegrasikan akan memerlukan waktu yang panjang.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan *Continuous Auditing* dan *Continuous Monitoring* sekaligus menurut (Vasarhelyi et al., 2006) antara lain adalah:

1. Dukungan manajemen
Faktor ini sangat krusial dalam mempengaruhi keputusan penerapan CACM, karena terkait dengan persetujuan dan perizinan dalam memberikan akses data.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia
Pengembangan CACM berkaitan erat dengan pemanfaatan sejumlah alat teknologi dan data digital, tentunya kesuksesan implementasinya akan sangat bergantung kepada kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai.
3. Manfaat dan Biaya
CACM dapat diadopsi apabila berdasarkan hasil pertimbangan manajemen manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada biayanya.
4. Dukungan regulasi
Keberadaan regulasi yang menjadi standar kewajiban CACM akan membantu implementasi menyeluruh.

Konsep CACM memerlukan kombinasi pemanfaatan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia. Hubungannya dapat digambarkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Konsep Penggunaan Teknologi dalam CACM (Ferianto, 2020)

a. Data Input

Dalam tahapan data input, akan dilakukan data penting terkait kondisi terkini. Setelah dikumpulkan akan dilakukan *cleansing* dan pemberian kode tertentu sehingga data dapat diolah dan dianalisis.

b. Data Analisis

Data hasil input dianalisis melalui jenis-jenis analisis seperti analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Analisis deskriptif merupakan pandangan visual yang efektif untuk menyimpulkan ‘apa yang terjadi’. Analisis biasanya dalam bentuk rangkuman data-data atau *dashboard*. Analisis diagnostik memanfaatkan hasil analisis deskriptif untuk menyimpulkan ‘mengapa itu terjadi’. Pada fase ini, dipelajari konektifitas data untuk mengidentifikasi pola keterhubungan. Analisis prediktif digunakan untuk melakukan prediksi logis atas kemungkinan di masa depan. Model yang dilakukan umumnya berupa statistik yang akurat untuk kualitas hasil prediksi. Dan analisis preskriptif mengintegrasikan semua hasil analisis sebelumnya untuk pengambilan tindakan dan keputusan.

c. Data Output

Output dari data analisis adalah infografis yang dinamis untuk pengguna data, sehingga segala kepentingan untuk melakukan sortir, membandingkan, melihat tren dan pengambilan dasar keputusan dapat dilakukan.

d. Pemanfaatan

Hasil output akan dimanfaatkan untuk sumber pengambilan langkah strategis.

Singkatnya, penerapan CACM di Indonesia dapat dilakukan apabila tersedia aplikasi (tools), contohnya aplikasi Siswaskeudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa), yang dikembangkan BPKP untuk pengawasan atas pengelolaan keuangan desa. Mengawasi hampir 75.000 desa di Indonesia tentunya hal yang mustahil jika dilakukan secara tradisional. Melalui aplikasi Siswaskeudes, APIP dapat melakukan teknik audit berbasis komputer dengan pendekatan risiko, dan karena dokumentasi proses dan hasil pengawasan sistematis dan rapi, maka CACM dapat dilakukan. CACM dapat memudahkan pengawasan pengelolaan desa oleh APIP.

Menurut Putro dan Pertiwi (2020), tahapan yang dilakukan untuk penerapan CACM melalui Siswaskeudes dimulai dengan tahap perencanaan audit. Tahapan ini berupa koneksi database untuk melakukan kompilasi database siswaskeudes. Kemudian diisi faktor-faktor risiko untuk menentukan desa prioritas, dan penentuan desa ini akan mempengaruhi jumlah tim audit dan monitoring yang ditetapkan. Tahapan kedua adalah pelaksanaan audit dan monitoring, berupa survei pendahuluan, pengujian pengendalian internal dan pengujian substantif. Kemudian Tahap ketiga adalah pengumpulan hasil temuan dan pelaporan hasil pengawasan.

Contoh lain penerapan CACM di Indonesia juga dilakukan oleh Bappenas, melalui penggunaan aplikasi SIMBAR (Sistem Informasi Pembayaran). Inisiasi SIMBAR dimulai pada tahun 2012, pada saat itu aplikasi SIMBAR hanya sebagai aplikasi pembayaran. Pada tahun 2018, SIMBAR juga digunakan sebagai aplikasi untuk monitoring yang dapat diintegrasikan dengan diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti SILAYAR (Sistem Integrasi Lacak Pembayaran), aplikasi presensi, aplikasi gaji, aplikasi pajak dan aplikasi e-Audit.

2.6 CACM dan *Three Lines Model*

CACM erat kaitannya dengan konsep *Three Lines Model*, yaitu sebuah model yang membedakan fungsi organisasi menjadi tiga bagian menjadi pertahanan lapis pertama yaitu pemilik risiko, pertahanan lapis kedua yaitu fungsi yang menangani risiko dan pertahanan lapis ketiga yaitu pihak yang menjamin secara independen (The Institute of Internal Auditors, 2020).

1. Pertahanan Lapis Pertama

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh fungsi yang merupakan ujung tombak dan garis depan organisasi. Dalam hal ini, fungsi ini diharapkan untuk dapat:

- a. Memastikan tersedianya lingkungan pengendalian organisasi yang kondusif
- b. Menerapkan kebijakan terkait dengan risiko yang muncul pada saat peran dan tanggungjawab mereka dilaksanakan untuk pencapaian tujuan. Kebijakan harus dibuat dan faktor risiko harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
- c. Mampu menunjukkan penerapan pengendalian yang efektif pada unit organisasi, serta memantau transparansi dan efektifitas pengendalian internal tersebut.

2. Pertahanan Lapis Kedua

Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh fungsi yang mengelola manajemen risiko.

Fungsi pertahanan lapis kedua ini adalah:

- a. Bertanggungjawab dalam pengembangan penerapan manajemen risiko organisasi.
- b. Melakukan pengawasan terhadap fungsi organisasi yang dilaksanakan dalam kebijakan risiko dan memastikan segala prosedur dan standar operasionalnya telah ditetapkan organisasi.
- c. Memantau dan melaporkan hasil pengawasan terkait riiko kepada manajemen yang memiliki akuntabilitas tertinggi di organisasi.

3. Pertahanan Lapis Ketiga

Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor, yang independen terhadap aktivitas organisasi perusahaan. Fungsi ini diharapkan dapat:

- a. Melakukan evaluasi dan reviu berkala terhadap pembentukan dan penerapan manajemen risiko secara komprehensif.
- b. Memastikan pertahanan lapis pertama dan kedua berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang ditetapkan organisasi.

Dalam *Three Lines Model*, APIP sebagai pertahanan lapis ketiga harus dapat memberikan *continuous auditing* (pengawasan berkelanjutan). Sedangkan manajemen dan pengelola risiko sebagai pertahanan pertama dan kedua harus melakukan *continuous monitoring*

(monitoring berkelanjutan). Monitoring berkelanjutan dilakukan untuk memastikan kebijakan, prosedur dan proses bisnis berjalan efektif.

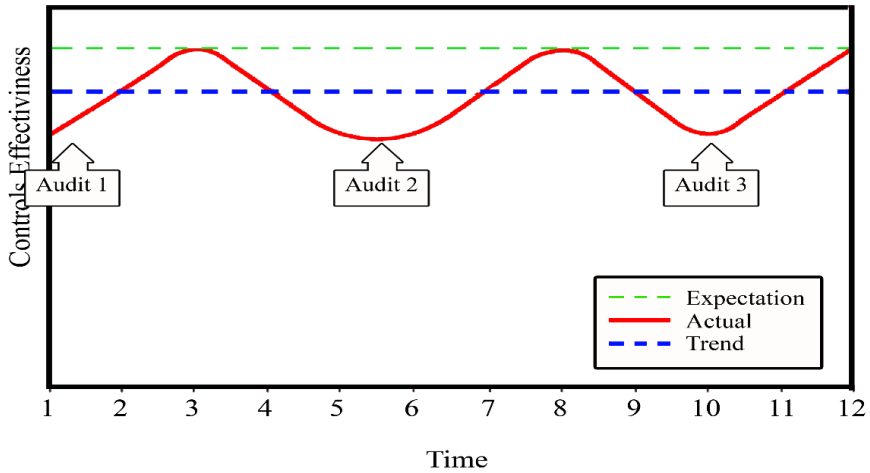
2.7 CACM untuk Organisasi yang Efektif dan Efisien

Menurut Lusiana, dkk. (2016) beberapa inovasi yang harus dilakukan terkait dengan efektivitas dan efisiensi pemerintahan diantaranya:

1. Pemangkasan struktur dan praktek yang terlalu banyak, untuk meningkatkan produktifitas organisasi dengan cara efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan penentuan prioritas melalui pengukuran risiko.
2. Membuat unit-unit pertanggungjawaban sebagai pendelegasian wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya.
3. Pengambilan keputusan secara cepat dengan memanfaatkan sistem informasi yang handal.
4. Menumbuhkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya pengukuran kinerja non finansial, untuk optimalisasi outcome.

CACM dapat mendukung tercapainya inovasi tersebut. Seperti definisinya, CACM adalah sebuah fungsi yang dilakukan dengan proses berkesinambungan, komprehensif dan terus-menerus dengan menggunakan teknologi informasi sebagai tonggak penggerak dalam sebuah organisasi. Berbeda dengan kebiasaan tradisional yang masih menggunakan sistem manual dan mengandalkan kegiatan observasi langsung, CACM menggunakan automasi dan memberikan keuntungan dalam hal peningkatan performa dan penghematan waktu (efisiensi).

Hiererra & Sarayar (2014) menggambarkan dampak pengawasan dengan metode tradisional dibandingkan dengan menggunakan CACM. Gambar tersebut menyajikan data kunjungan audit dan pengaruhnya terhadap efektifitas pengawasan. Pada audit tradisional (konvensional), efektifitas pengawasan meningkat setelah dilakukan kunjungan, namun setelah beberapa waktu akan menurun kembali diantara selang waktu kunjungan audit tersebut. Hal ini disebabkan kecenderungan manusia untuk kembali pada kebiasaan ketika merasa tidak dawasi.



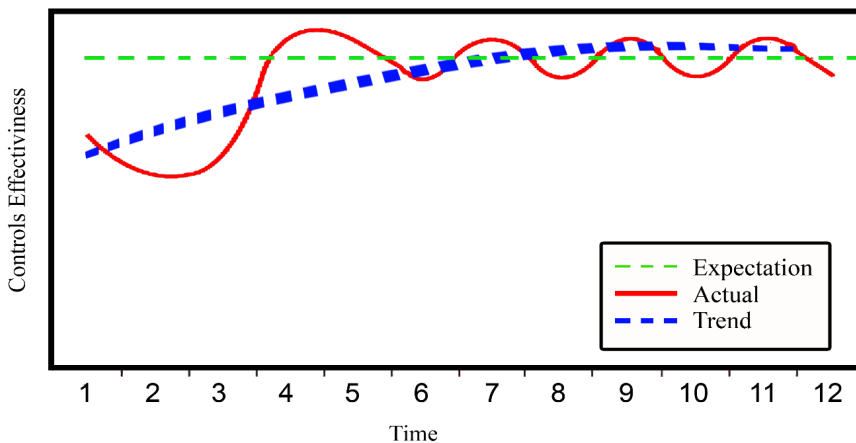
Gambar 2. Pengaruh Audit Tradisional terhadap Efektivitas Organisasi (Hiererra & Sarayar, 2014 dikembangkan secara pribadi oleh penulis)

Pada CACM, periode pengawasan dilakukan berkelanjutan dan terus menerus. Segala permasalahan dapat terdeteksi dengan cepat dan dapat diperbaiki dengan akurat saat itu juga. CACM membuat auditor dan pengawas dari manajemen akan lebih sering melakukan kontak dengan objek yang diawasi. Menurut Hiererra & Sarayar (2014), keuntungan menggunakan

CACM antara lain:

1. Mengurangi waktu tunggu
2. Pengawasan dapat dilakukan ketika terdapat celah pengendalian
3. Pengawasan dapat dilakukan dengan memeriksa populasi, tanpa harus menambah biaya yang dikeluarkan.
4. Pengawasan mempunyai lebih banyak alternatif, karena tidak terkendala waktu dan sumber daya pemeriksa.

Tentunya hal ini akan membuat efektivitas organisasi meningkat, seperti terlihat pada gambar berikut ini:



(Hiererra & Sarayar, 2014 dikembangkan secara pribadi oleh penulis)

Gambar 3. Pengaruh CACM terhadap Efektivitas Organisasi

3. KESIMPULAN

Perkembangan globalisasi, kompleksitas regulasi, tekanan kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi pemerintahan yang cepat, menyebabkan semakin tingginya tanggungjawab manajemen dan munculnya beragam risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan. Manajemen pada organisasi sektor publik harus merespon dengan tepat, sehingga sebagai strategic partner dan trusted advisor, APIP harus dapat memberikan nilai tambah dan informasi yang akurat dan cepat kepada manajemen, kapanpun informasi tersebut dibutuhkan. Diperlukan inovasi berupa proses pengauditan yang secara komprehensif menggunakan media elektronik untuk mengolah data secara berkelanjutan dan simultan, agar dapat menghasilkan tingkat pengungkapan informasi yang cepat dan berkualitas. CACM adalah salah satu solusi yang dapat diterapkan.

Berbeda dengan kebiasaan tradisional yang masih menggunakan sistem manual dan mengandalkan kegiatan observasi langsung, CACM menggunakan automasi dan memberikan keuntungan dalam hal peningkatan performa dan penghematan waktu. Keuntungan menggunakan CACM dari segi efisiensi antara lain mengurangi waktu tunggu, pengawasan dapat dilakukan ketika terdapat celah pengendalian,

pengawasan dapat dilakukan dengan memeriksa populasi, tanpa harus menambah biaya yang dikeluarkan, serta pengawasan mempunyai lebih banyak alternatif, karena tidak terkendala waktu dan sumber daya pemeriksa.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Coderre, D. (2005). Continuous Auditing : Implications for Assurance , Monitoring , and Risk Assessment. *Global Technology Audit Guide*, 3, 1–33.
- Ferianto, T. (2020). Mendesaknya Implementasi CACM di Kala Pandemi: Sebuah Skenario. *Birokrat Menulis*. <https://birokratmenulis.org/mendesaknya-implementasi-cacm-dikalapandemi-sebuah-skenario/>
- Hiererra, S. E., & Sarayar, M. O. I. (2014). Continuous Audit: Implementasi dan Pengendalian Berbasis Teknologi Informasi dalam Menjalankan Fungsi Audit yang lebih Efektif dan Efisien. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 763. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2238>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Lusiana dkk. (2016). *Audit Sektor Publik Terapan*. Interpena, Yogyakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang
Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan.

Pitt, S. A. (2014). *Internal Audit Quality: Developing a Quality Assurance and Improvement*

Program. John Wiley & Sons Inc, New Jersey.

Rezaee, Z., Sharbatoghlie, A., Elam, R., & McMickle, P. L. (2018). Continuous Auditing: Building Automated Auditing Capability. *Continuous Auditing*, 169–190. <https://doi.org/10.1108/978-1-78743-413-420181008>

Sarwar, M. G., Dragisic, B., Salsberg, L. J., Gouliaras, C., & Mark, S. (2010). Continuous monitoring and continuous auditing From idea to implementation. *Spectrum*, 16.

The Institute of Internal Auditors. (2020). *Model Tiga Lini IIA 2020 Pembaharuan dari Model*

Pertahanan Tiga Lini.

Vasarhelyi, M. A., Littley, J., & Williams, K. (2006). Continuous Auditing technology adoption in leading internal audit organizations. *January 2008*, 1–10.